



**BAB
VII**

GERAKAN SOSIAL
KEMANUSIAAN





GERAKAN SOSIAL KEMANUSIAAN DALAM MASA KRISIS

Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) telah menggelar permusyawaratan dan Konperensi Nasional Kesejahteraan Sosial yang Ketiga di Bukittinggi, Sumatra Barat dengan sukses. Setelah Rapat Anggota dan Konperensi Nasional itu, lembaga DNIKS yang didirikan sejak tahun 1967 sebagai wadah bersatunya organisasi sosial kemasyarakatan dari seluruh Indonesia, dan mempunyai misi sangat sarat dengan kemanusiaan yang luhur, nampaknya menjadi makin segar dan tegar mengembangkan gerakan sosial kemanusiaan dalam masa krisis yang sangat mencekam dewasa ini.

Lembaga yang merupakan himpunan dan forum kerjasama dari hampir semua organisasi sosial kemanusiaan di Indonesia itu nampaknya makin siap bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lainnya untuk meningkatkan pengabdianya mengantar keluarga kurang beruntung menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Para peserta Rapat Kerja dan Konperensi Nasional menyadari adanya tantangan yang tidak kunjung selesai.



Mereka telah bekerja keras dimasa lalu dan telah dengan tekun mempersiapkan lembaga masing-masing untuk menapak masa depan dengan penuh percaya diri. Mereka sangat berharap lembaga DNIKS bisa bergerak lebih lincah dalam mendampingi anggotanya memberdayakan keluarga yang kurang beruntung.

Konperensi yang berlangsung dengan sukses selama dua hari penuh telah menggelar pakar-pakar di bidang ekonomi sosial untuk bicara langsung membawakan makalah yang berisi pemikiran bagaimana pembangunan multi kompleks harus memihak rakyat kurang mampu.

Pembangunan yang memihak itu akan memberikan dukungan pemberdayaan sehingga masyarakat agar mampu hidup layak secara mandiri. Hanya masyarakat mandiri bisa memberikan dukungan kepada seluruh



anggota keluarganya. Bahkan, masyarakat dengan anggota keluarga yang mempunyai masalah sosial sebaiknya tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah kalau saja keluarga dan masyarakat di sekitarnya mempunyai rasa kepedulian yang tinggi dan secara ekonomis mampu memberikan santunan dan pencerahan secara langsung.

Pola pembangunan ekonomi yang tidak memihak kepada keluarga kurang mampu, apalagi tidak mempunyai kepedulian yang tinggi, akan sukar diharapkan kontribusinya untuk memberikan keuntungan ganda kepada rakyat banyak, yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa ini, dan proses pemberdayaan yang berkesinambungan dan lebih bermakna kepada masyarakat kurang mampu.

Proses pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang tidak terarah dan tidak komprehensif tidak bakal mampu mengangkat masyarakat yang telah lama terpuruk. Proses pemberdayaan harus bersifat memihak, pro keluarga dan masyarakat kurang mampu. Penyerahan proses itu kepada mekanisme pasar semata, nampaknya tidak akan mampu mengangkat masyarakat terpuruk yang biasanya mempunyai ciri kemampuan sosial ekonomi yang sangat rendah.

Antusiasme para peserta Konperensi nampaknya sejalan dengan harapan peserta yang jauh-jauh hari ingin melihat pemikiran mutakhir tentang pembangunan bangsa ini. Materi Konperensi yang sejalan dengan semangat anggota yang berkembang dalam Rapat Anggota yang lebih bersifat internal segera diterjemahkan dengan mempersiapkan lembaga DNIKS agar bisa bergerak lebih lincah.

Pemilihan 21 anggota perwakilan dalam majelis diikuti dengan



kemauan keras untuk menyempurnakan organisasi dengan perangkat yang lebih kokoh dan luas. Para wakil lembaga anggota dan lembaga daerah sepakat untuk menyegarkan dan merumuskan Anggaran Dasar menjadi pedoman baru yang memberi ruang gerak yang lebih dinamis bagi pengurus di tingkat pusat dan anggotanya di tingkat daerah.

Setelah melalui perbincangan tukar menukar pendapat yang cukup dinamis dan konstruktif, akhirnya disepakati bahwa Pengurus Pusat dilengkapi dengan tiga buah Badan yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling mengisi. Badan yang pertama adalah penjemaaan Majelis dengan 21 anggota mewakili lembaga daerah, organisasi anggota dan tokoh yang dipandang mempunyai kemampuan dan peduli terhadap masalah sosial kemasyarakatan.

Badan kedua adalah Pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara seperti layaknya suatu organisasi. Dan Badan ketiga adalah Badan Pertimbangan terdiri dari ketua dan anggota. Semua anggota ketiga Badan tersebut prinsipnya diambil dari wakil-wakil yang telah dipilih Rapat Anggota dan apabila perlu dapat ditambah dengan tenaga lain yang dianggap mampu dan siap membantu pembangunan masyarakat yang sejahtera.

Ketiga Badan tersebut diharapkan menjadi penyulut dinamika lembaga DNIKS untuk bisa lebih lincah, sekaligus bisa menampung berbagai aspirasi, baik keberhasilan masa lalu maupun aliran aspirasi yang tidak pernah kering dari daerah-daerah dan organisasi anggotanya. Dengan adanya Badan Pertimbangan yang tugasnya menampung aspirasi, memberi nasehat dan peringatan, serta dukungan kepada Badan Pengurus, penampungan aspirasi dan pengawasan jalannya seluruh proses pemberdayaan dapat diikuti dengan lebih cermat.



Petunjuk yang jelas tentang proses pemberdayaan yang sulit dan berbelit dari mereka yang berpengalaman, contoh-contoh keberhasilan dari para pendahulu yang bergerak dengan berhasil dari para sesepuh, memberi kesempatan kepada Badan Pengurus untuk bekerja keras tanpa harus berbelit merumuskan aspirasi menjadi kegiatan baru yang harus dicoba.

Dengan demikian, kalau aliran aspirasi dari daerah dan lembaga anggota bisa berjalan paralel, akhirnya program dan kegiatan operasional untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu di lapangan, akan bisa mengerucut sesuai aspirasi masyarakat yang kurang beruntung. Lembaga DNIKS akan menjadi mitra kerja pemerintah yang sangat terpercaya. Dengan pendekatan baru ini anggota merasa yakin bahwa DNIKS akan tampil tegar untuk membangun budaya peduli anak bangsa yang terpercaya.

Lebih dari itu, Program Kerja yang disusun cukup pragmatis. Setiap daerah dan lembaga anggota mendapat kesempatan mengembangkan diri secara mandiri. Pengurus pusat diharapkan bisa merangsang dengan gagasan-gagasan yang mudah dilaksanakan dan memberikan hasil yang positif.

Pengembangan jaringan peduli anak bangsa mendapat prioritas yang tinggi. Jaringan tersebut diharapkan bisa mendeteksi masyarakat kurang beruntung secara dini. Penyelesaian gotong royong dan segera diharapkan bisa menyelesaikan masalah dan menyuburkan tumbuhnya budaya peduli anak bangsa.

D



MEMBANGUN Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Tanggal 29 Agustus 2005 lalu, suatu pertemuan akbar para pejuang keadilan dan kesejahteraan sosial mulai di gelar di Bukittinggi, Sumatra Barat. Ketua Umum DNIKS, Bustanil Arifin, Gubernur Sumbar dan Menteri Sosial RI direncanakan membuka dan memberikan sambutan pada pertemuan yang sekaligus dijadikan sebagai tradisi Konperensi Nasional Kesejahteraan Sosial tersebut.

Konperensi ini akan mendengarkan paparan para ahli tentang teori dan praktek pembangunan sosial, pemberdayaan sumber daya manusia yang mengantar kesejahteraan yang merata, pembangunan ekonomi yang memihak pada kesejahteraan masyarakat, dan paparan pikiran-pikiran brilian yang bila mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan baik bisa membawa suasana yang sejuk yang menghargai budaya peduli terhadap sesama anak bangsa.

Rangkaian paparan yang diikuti oleh ratusan pejuang dari seluruh Indonesia itu diharapkan bisa memberi dorongan dan penyegaran terhadap upaya meningkatkan budaya peduli terhadap masyarakat dan keluarga yang hidupnya terganggu oleh masalah-masalah sosial yang tidak kunjung reda.

Konperensi sekaligus memohon limpahan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa agar di tanah air yang kaya ini berkembang mekar budaya peduli terhadap anak bangsa yang mampu mengantarkan tercapainya kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Para pejuang sosial kemanusiaan sungguh sangat resah melihat dan mengamati masyarakat kita yang dilanda perubahan jaman dan arus globalisasi yang sangat dahsyat. Sifat-sifat individualistik yang sempit dan melemahnya rasa solidaritas, apabila tidak segera ditangani akan membawa malapetaka yang sukar ditanggulangi.





Kesempitan kesempatan kerja yang mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan menambah tekanan terhadap mengembangkannya budaya peduli terhadap anak bangsa. Namun demikian, keadaan itu pernah kita alami, dan toh tidak memberikan kepada para sesepuh bangsa rasa tidak saling membenci, tetapi justru mempertebal persatuan dan kesatuan bangsa. Mempertebal rasa solidaritas dan komitmen untuk membantu anak bangsa yang tertimpa kesengsaraan dan ketidak pastian.

Konperensi berpendapat bahwa rasa tidak peduli yang mengkoyak-koyak banyak norma kehidupan bangsa yang luhur, yang dirumuskan dalam Pancasila, harus segera diluruskan dan diperbaiki. Masyarakat gandrung pada kehidupan yang beradab dengan keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa.

Kehidupan dengan landasan Pancasila yang dirumuskan dengan manis dan lengkap oleh nenek moyang sesepuh bangsa tersebut harus segera ditempatkan kembali dalam papan indah yang kokoh sebagai alat pemersatu dan sekaligus penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara yang luhur dan berkelanjutan.

Kepedulian anak bangsa yang biasanya muncul secara otomatis memberikan dukungan terhadap anak bangsa yang terkena masalah sosial, teraliniasi, dan terpuruk, akhir-akhir ini mendadak hilang lenyap hampir tanpa bekas. Kehidupan penuh perhatian dan kasih sayang harus dipancing kembali untuk mengetengah dengan tegar dan terhormat. Para pejuang sosial kemasyarakatan harus tampil dinamis dan gesit tanpa ada rasa malu.

Konperensi harus bisa mengundang dan menambah semangat para pejuang sosial kemanusiaan yang selama ini melihat perubahan yang terjadi



dengan rasa prihatin untuk mengembangkan harapan baru, bangkit dan dengan percaya diri memanggil kembali teman dan rekannya yang seakan tertegun, dan segan muncul karena takut dianggap masyarakat kuno yang tradisional dan tidak berpikiran modern, untuk berani tampil kembali dengan perjuangan yang lebih gigih.

Para pejuang sosial kemanusiaan yang “*membakar diri dan semangatnya*” di “*bukit yang tinggi*” (Bukittinggi) di Sumatra Barat tersebut harus bisa bersama-sama “mengingatkan” anak bangsanya untuk berbondong-bondong muncul kembali dengan hati nurani dan norma luhur yang memberi perhatian dan komitmen terhadap sesamanya.

Konperensi harus berani, terutama pada anak bangsa yang tersisih dan terpuruk, memberi harapan baru. Konperensi harus bisa menunjukkan kembali sifat luhur bangsa yang asli, sifat peduli dan memberi, yang biasanya tidak *sopan* ditonjolkan. Namun, dalam keadaan bangsa yang kehilangan pegangan, nampaknya *sifat luhur* itu masih perlu dikemas sebagai “*petunjuk*” untuk ditiru dan dijadikan pedoman bersama. Kedengarannya agak aneh, sesuatu yang dimasa lalu nampak “*saru*” untuk ditonjolkan, atau “*kurang tepat*”, terpaksa perlu dilakukan.

Konperensi yang hampir pasti tidak akan diliput oleh media masa sebesar dan semewah kegiatan *Kontes Indonesia Idol*, *Kontes Dang Dut API*, atau acara musik *Slank* yang digemari anak muda, akan dibarengi pula dengan paparan oleh para pejuang dan ahli dalam bidang sosial kemasyarakatan yang biasanya menjadi penuntun masyarakat yang tersisih.

Ada acara pemaparan pengalaman tentang penanganan warga yang



menderita kecacatan, ada acara khusus yang membahas pemberdayaan bagi perempuan, ada acara pemaparan tentang pemberdayaan anak yang tersisih, dan ada pula pemaparan tentang masyarakat dan keluarga yang tidak beruntung.

Berbagai pemaparan itu masih pula akan dilengkapi dengan perhatian yang tinggi terhadap warga berusia lanjut yang dalam duapuluh lima tahun mendatang jumlahnya akan meningkat menjadi tidak kurang dari 25 juta jiwa. Padahal, dalam massa yang relatif panjang itu, umumnya masih akan miskin dan kurang sejahtera. Itu pula sebabnya pertemuan besar itu akan mencoba membongkar akar-akarnya dengan pengenalan secara dini proses pemberdayaan keluarga yang lebih berkelanjutan.

Tidak dilupakan beberapa ahli akan membongkar akar-akar penyebab makin maraknya penyebaran virus HIV/AIDS dan pengembangan jaringan usaha kecil menengah yang diharapkan akan mampu memperbaiki kondisi keluarga Indonesia yang miskin dan terpuruk secara bertahap.

Kalau berbagai acara itu bisa memberi bekal dan terutama membangkitkan semangat pesertanya, dan sekaligus merumuskan langkah-langkah membangun budaya peduli anak bangsa, kiranya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di masa depan akan lebih kondusif dan mampu mengantar masyarakat dan bangsa Indonesia mencapai cita-cita seperti di impikan sesepuh kita, yaitu membangun masyarakat yang bahagia, yang adil dan makmur, dan merata bagi seluruh anak bangsa.

D



MASYARAKAT AKRAB BENCANA

Beberapa waktu lalu Pulau Nias dan beberapa daerah di sekitarnya kembali dilanda gempa, yang menurut berita lebih hebat dari letusan bom atom di Hiroshima yang dahsyat. Malapetaka itu seakan datang dengan tiba-tiba justru pada saat penduduk pulau itu belum sembuh dari trauma gempa dan tsunami sebelumnya.

Dua peristiwa yang terjadi dalam waktu belum seratus hari itu mengharuskan kita untuk mengembangkan pemikiran jangka panjang yang strategis dengan mempersiapkan diri, melakukan kerja keras menyadarkan masyarakat, pemerintah dan semua kekuatan pembangunan, untuk bersama-sama mengembangkan budaya baru, budaya akrab dengan bencana.

Negara kita bukan saja termasuk negara dengan penduduk yang jumlahnya besar, tetapi juga termasuk wilayah yang kaya dengan bencana. Dalam setiap musim hujan masyarakat selalu berhadapan dengan air yang melimpah. Limpahan yang datang dengan tiba-tiba dan dalam jumlah yang sangat besar itu mengalir deras berupa banjir yang dahsyat.





Sepanjang sejarah selalu dicatat bahwa kita tidak pernah bisa menyiapkan diri untuk menghadapi bencana itu dengan baik. Berbagai rancangan untuk mengalihkan aliran banjir ke daerah-daerah yang tidak padat penduduk, atau tidak padat kekayaan alam berupa sawah dan perkebunan yang kaya, atau mengalihkannya untuk menghindari permukiman yang penuh dengan pabrik dan kekayaan rekayasa manusia lainnya, belum berhasil dengan baik.

Banjir yang melanda banyak permukiman dan daerah-daerah kaya dengan kepentingan hidup manusia, bahkan daerah-daerah yang padat penduduk, selalu saja memakan korban dengan nilai hitungan milyar, bahkan triliunan rupiah. Jauh diatas kemampuan setiap penghuni wilayah yang dilanda banjir untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Setelah musim hujan reda, sementara pemerintah dan masyarakat memperbaiki berbagai kerusakan akibat banjir yang memporak-porandakan kekayaan masyarakat yang dengan susah payah dikumpulkan rupiah demi rupiah, datang kekeringan dengan segala bawaannya.

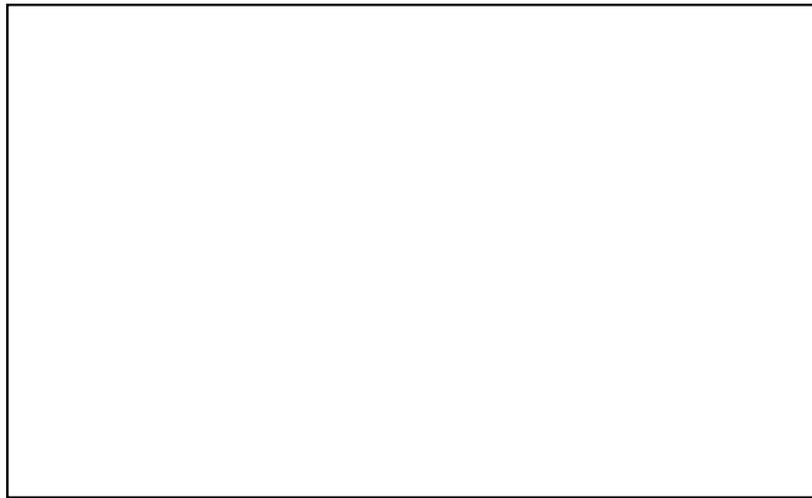
Di kota-kota besar padat penduduk, kekeringan itu membawa bencana yang menakutkan. Seluruh pemukiman, terutama pemukiman padat dan kumuh, dengan mudah bisa menjadi mangsa bola merah yang disebabkan hal-hal sepele tetapi menakutkan. Puntung rokok yang disulut sebagai hati iseng yang resah, bisa menjadi awal dari malapetaka kebakaran yang menakutkan.

Sambungan listrik yang sengaja di cabang ke berbagai tempat tanpa perhitungan yang benar, bisa menjadi awal dari habisnya seluruh perkampungan kumuh yang tidak mampu membayar aliran listrik secara



resmi, atau menata sistem listrik di rumahnya dengan rapi. Atau kompor yang karena sudah tidak memenuhi syarat keamanan, terpaksa masih dipergunakan karena tidak ada lagi uang tersisa untuk membeli kompor yang baik. Dengan ledakan sederhana saja kompor itu, api liar yang keluar bisa menghabiskan seluruh permukiman dan menempatkan penghuninya kehilangan atap untuk meneduh dan segala miliknya.

Dari dua peristiwa yang secara rutin selalu terjadi setiap tahun tersebut kiranya sudah jelas bahwa pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat dan harus mengembangkan masyarakat akrab bencana. Lebih-lebih



lagi dengan adanya dua kali gempa yang sangat dahsyat di Aceh dan Nias dalam waktu kurang dari seratus hari terakhir ini. Pengembangan masyarakat dan budaya akrab bencana menjadi kebutuhan yang sangat luar biasa.





Diperlukan komitmen politik pemerintah untuk mengembangkan masyarakat dan budaya akrab bencana tersebut. Namun, komitmen politik itu tidak boleh menjadi penghambat birokrasi untuk berkembangnya masyarakat dan budaya akrab bencana itu direduksi menjadi semacam “proyek” yang mengagungkan semata pada ada tidaknya mata anggaran dalam APBN.

Komitmen itu harus menghasilkan fasilitasi, pedoman dan pendampingan agar semua elemen yang ada di dalam masyarakat bisa bergerak dengan lebih lincah. Fasilitasi itu harus menghasilkan dibukanya akses yang lebih lentur dan dinamis dari semua kekuatan yang ada dalam jangkauan pemerintah untuk dengan mudah diakses oleh masyarakat dalam mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengembangan masyarakat dan budaya akrab bencana tersebut.

Ringkasnya, pengembangan masyarakat dan budaya akrab bencana itu harus menjadi gerakan masyarakat yang dinamis dan siap dijadikan idola oleh masyarakatnya sendiri. Momentum untuk itu sungguh sangat tepat. Terjadinya dua peristiwa gempa yang sangat dahsyat dalam waktu hanya seratus hari ini merupakan momentum yang paling baik untuk mengumumkan gerakan yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut.

Apabila gerakan itu dapat diwujudkan, titik perhatian gerakan di masing-masing daerah harus berbeda-beda. Di daerah yang rawan gempa seperti misalnya daerah pulau Nias, Banda Aceh dan sekitarnya, yang kita ketahui gempanya bisa saja disertai dengan tsunami, masyarakat harus mempunyai komitmen untuk mempelajari pengalaman masa lalu dengan sungguh-sungguh. Masyarakat dengan belajar itu mempunyai kesadaran dan pengetahuan yang mendalam, yang membudaya, bagaimana dengan



sentuhan *early warning system* yang sederhana dapat mengambil reaksi sewaktu-waktu ada tanda bahaya.

Sementara itu, selama masa tidak ada gempa dan tidak ada tsunami, masyarakat bisa mempersiapkan tempat-tempat pengungsian manakala ada aliran gelombang tsunami yang dahsyat. Secara gotong royong, di tempat-tempat yang luas dan datar, dapat dipersiapkan tempat atau daerah-daerah tertentu yang dibuat lebih tinggi, semacam perbukitan, untuk cadangan kalau-kalau penduduk sekitarnya tidak sempat mengungsi ke daerah lain yang lebih tinggi tetapi letaknya lebih jauh.

Lebih dari itu, masyarakat dapat mempersiapkan jalan-jalan darurat ke daerah-daerah pengungsian. Dan masyarakat bisa dilatih untuk mempergunakan jalan darurat tersebut. Kalau terjadi malapetaka yang mendadak, masyarakat tidak lagi keliru memilih jalur pengungsian yang aman dan memberikan pertolongan.

Hal yang sama dapat diperlakukan pada daerah yang sering dilanda banjir. Masyarakat diharapkan bisa menyiapkan daerah-daerah yang menurut ukuran dan pengalaman banjir, lebih tinggi dibandingkan dengan banjir yang pernah melanda daerahnya di masa lalu. Jalan-jalan menuju daerah semacam ini harus secara jelas diberi tanda, sehingga dalam kepanikan menghadapi banjir, penduduk yang kebingungan sudah siap mental dan mengetahui dengan baik bagaimana menuju daerah yang dianggap aman dan bisa memberi pertolongan sementara pada waktu terjadi musibah.

Untuk layak sebagai tempat pertolongan sementara tersebut, daerah-daerah tersebut, dalam hal menghadapi banjir dan aliran tsunami yang besar, bukan saja harus memenuhi persyaratan ketinggian, tetapi juga harus





mempunyai kesiapan lain sesuai dengan kebutuhan darurat. Bahkan, bisa saja daerah-daerah pertolongan darurat tersebut dikembangkan menjadi daerah untuk kepentingan umum yang tetap banyak gunanya manakala tidak ada musibah.

Gerakan akrab musibah itu mempunyai tanggung jawab utama untuk menyebar luaskan informasi tentang musibah yang selalu terjadi dan menimpa suatu wilayah tertentu, baik dalam rutinitas jangka pendek, maupun rutinitas dalam jangka yang panjang. Aliran informasi itu kiranya dapat membangkitkan kesadaran yang mendalam, bukan saja dalam sikap, tetapi yang penting adalah membangkitkan gairah tingkah laku yang mendorong dikembangkannya persiapan-persiapan yang dianggap penting dan memberi manfaat untuk orang banyak.

Gerakan itu tidak boleh diserahkan kepada birokrasi yang lamban, tetapi perlu menggalang komitmen dan kerjasama dengan birokrasi yang ada di setiap jajaran pemerintahan agar tidak mendapat hambatan yang memperlambat gerakan mulia yang dibutuhkan masyarakat luas tersebut. Gerakan akrab bencana merupakan gerakan yang tetap tumbuh dan sewaktu-waktu bisa saja menggebrak dengan gegap gempita, yaitu setiap keadaan menuntut dan menguntungkan.

Namun diharapkan bahwa gerakan ini mempunyai kegiatan rutin yang sifatnya memelihara kesadaran dan melakukan persiapan-persiapan preventif sepanjang tahun agar seluruh jajaran, terutama jajaran pemerintah dan pemegang kendala teknis dalam gerakan, seperti misalnya perahu untuk banjir, mobil pemadam kebakaran untuk peristiwa kebakaran, obat-obatan untuk menaggulangi akibat gempa bumi, dan sebagainya, siap untuk disiagakan dan bergerak secara cepat.



Gerakan ini harus juga mengembangkan kerjasama dan aliansi dengan berbagai macam lembaga yang mempunyai kegiatan sama atau hampir sama, misalnya dengan PMI, dengan Pramuka, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dalam kondisi tidak ada peristiwa gempa, banjir atau kebakaran, gerakan tersebut dapat mengadakan latihan bersama, sekaligus sebagai upaya untuk mengembangkan kesadaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gempa, banjir atau kebakaran yang biasa datang, atau yang mungkin saja akan terjadi dalam waktu yang singkat.

Kalender-kalender bencana harus menjadi pedoman untuk mengembangkan kalender kegiatan, biarpun mungkin saja kalender itu tidak tepat. Misalnya, diramalkan ada bencana El Nino. Ramalan akan adanya El Nino tersebut bisa menjadi momentum untuk menjadi pedoman segala sesuatu yang harus dipersiapkan menjelang atau sesudah terjadi El Nino. Kalau perlu gerakan ini bisa mengadakan Tim Bersama untuk menanggulangi El Nino tersebut secara mandiri.

Dari Tim itu kemudian lahir kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk mengangkat kesadaran dan menambah pengetahuan masyarakat, termasuk mengundang partisipasi dan komitmen politik pemerintah melakukan persiapan menghadapi bahaya El Nino yang diramalkan tersebut.

Persiapan serupa dapat dilakukan dalam menghadapi kekeringan karena datangnya musim kemarau yang akan datang. Suatu Tim bersama dari berbagai lembaga masyarakat, bersama komitmen dan partisipasi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, lebih-lebih dalam suasana otonomi daerah, harus jauh-jauh hari dipersiapkan.

Tim ini menyusun program dan mengembangkan partisipasi yang



tinggi sehingga akibat dari kekeringan, yang pasti akan datang dan akan sangat berat, bisa diantisipasi seakan-akan semua pihak sudah tahu dan siap melakukan langkah-langkah untuk menanggulangnya.

Secara psikologis masalah yang dihadapi menjadi terasa lebih ringan dan semua pihak bukan mengadakan “seminar” tentang kenapa kita tidak tahu, tetapi mengadakan gerakan menolong sesuai dengan rencana pertolongan yang dengan masak telah dipersiapkan sebelumnya.

Peristiwa gempa di Nias bisa menjadi momentum untuk mengembangkan gerakan akrab bencana gempa dengan persiapan-persiapan yang lebih matang. Masyarakat, melalui partisipasi yang tinggi, melalui radio, tv dan surat kabar, dapat diajak untuk membangun *early warning system* bersama pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Harga alat yang mungkin saja mahal dapat menjadi lebih ringan apabila ditanggung bersama antara pemerintah dan masyarakat, atau lembaga swasta yang siap memberikan bantuan. Anak-anak muda dari berbagai perguruan tinggi dapat mengikuti pelatihan dan pendidikan jangka panjang, di dalam dan di luar negeri, agar mampu mengoperasikan alat dan perlengkapan yang mungkin canggih tersebut.

Apabila peralatan canggih telah dimiliki, hasil-hasil rekamannya harus secara transparan dipublikasikan. Transparansi itu harus diramu secara menarik dan dramatis sehingga masyarakat awam bersedia untuk membacanya. Kalau sekedar disajikan sebagai angka-angka statistik mentah, tentu tidak akan menarik dan makin lama surat kabar, televisi atau radio yang menyiarkan akan menghentikan penyebutannya.



Dramatisasi untuk menolong dan mempersiapkan masyarakat akrab bencana tersebut harus mengambil pendekatan sayang kepada manusia, dan menghargai manusia layaknya sebagai manusia terhormat dan bermartabat. Penghargaan kepada manusia mengharuskan gerakan ini menempatkan manusia sebagai titik sentral pemberdayaan.

Insy Allah, biarpun peristiwa Nias bisa saja terjadi lagi, tetapi penduduk Nias, atau penduduk di manapun mereka berada, akan akrab dengan bencana, dan siap memberi kesempatan alam untuk berkembang sesuai dengan iramanya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena diberi akal dan kemampuan, untuk dengan ridho dan petunjukNya, mempersiapkan diri selalu akrab dengan ciptaanNya.

D





SOLIDARITAS MEMBANGKITKAN PERSATUAN BANGSA

Gempa yang disusul tsunami gemuruh dahsyat yang mengejutkan di Minggu pagi tanggal 26 Desember 2004 lalu, di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara mengalirkan gelombang deras yang bergulung-gulung setinggi pohon kelapa itu telah menyapu apa saja yang menghalangi di hadapannya. Rumah beserta perabotan, mobil yang diparkir di halaman, bahkan yang secara tenang diistirahatkan di garasi, kapal dan perahu nelayan yang dengan tenang sedang berlabuh, segalanya dihantam habis bersih tergulung jauh dari pangkalannya.

Bahkan tidak jarang benda-benda yang beratnya berton-ton itu membanting dan memporak-porandakan apa saja yang menghalangi perjalanan ke daratan yang jauh melewati wilayahnya. Manusia yang menjerit-jerit memanggil nama Tuhan Yang Maha Kuasa serta sanak saudaranya yang terbawa arus tidak mampu menyaingi deru ombak dan hantaman benda berat yang saling menerjang. Tangisan orang tua bercampur bayi dan anak-anak yang menjerit-jerit tidak terdengar atau tidak mendapat tanggapan lagi karena semuanya mengalami nasib yang sama.



Pertolongan tidak ada lagi, mereka yang selamat adalah karena mukjizat yang diberikan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia benar-benar merupakan makhluk kecil yang lemah dan tidak berdaya. Yang kaya dan yang miskin, yang laki-laki gagah perkasa, atau perempuan lemah gemulai, tidak ada bedanya lagi, semuanya sama-sama lemah tidak berdaya menghadapi amukan gempa dan tsunami yang tidak kenal ampun tersebut.

Malapetaka yang menghancurkan leburkan segala prasarana, perkantoran, fasilitas umum dan perumahan penduduk yang tidak berdosa telah menelan korban puluhan, bahkan ratusan ribu penduduk meninggal dunia atau kehilangan anggota keluarganya. Banyak kakek kehilangan anak cucunya, banyak orang tua kehilangan anak, banyak anak-anak yang kehilangan orang tua dan kerabatnya.

Kehidupan yang tertata rapi dalam sekejap luluh lantak tidak ada yang berbekas. Pemerintahan lumpuh karena banyak karyawan yang kehilangan nyawa dan kerabatnya. Banyak kantor berantakan tidak ada bekasnya. Dan banyak pula hubungan antar daerah terputus membuat daerah terisolasi tanpa hubungan dan berita apapun yang memberi tanda-tanda masih adanya kehidupan yang bermartabat.

Secara spontan bangsa Indonesia dari segala penjuru pelosok bangkit kesadaran kebangsaan dan kemanusiaannya. Jeritan yang semula tidak terdengar karena deru ombak yang bertalu dengan gempuran jebolan bangunan dan barang-barang yang saling berbenturan mulai terdengar nyaring.

Jeritan tangis dan raungan meminta pertolongan yang dengan ijin Allah, Tuhan Yang Maha Esa, direkam oleh juru kamera amatiran secara



tidak sengaja mulai disiarkan televisi nasional swasta. Bahkan hasil rekaman amatiran itu disiarkan dengan lebih dramatis lagi karena muncul pula di siaran televisi internasional dengan diramu hasil amatiran dari negara tetangga dengan gambaran yang serupa.

Penyiaran yang bertubi-tubi itu memilukan. Jeritan lirih bertambah keras dan memilukan. Tangisan demi tangisan diikuti oleh keluarga Indonesia yang merasa satu bangsa dan satu penderitaan. Isak tangis yang makin hari makin keras dan memilukan datang bukan dari sanak keluarga dekat. Dari satu rumah ke rumah lain terdengar isak tangis yang makin seru dan memilukan.

Mereka bisa salah sangka, kiranya ada seorang saudara dekat terkena musibah. Tetapi betul, saudara kita di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),



Sumatra Utara, Nias, Sri Langka, Thailand dan India sedang mendapat musibah cobaan Tuhan. Bangsa Indonesia menangis dan meratapi saudaranya yang dirundung malang di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara dan belahan bumi lainnya.

Isak tangis itu bukan berhenti dengan air mata. Secara spontan keluarga Indonesia dari segala pelosok desa, dari Medan sampai ujung Papua berama-ramai merogoh kantongnya, membongkar lemari pakaiannya, membongkar lemari makanan dan lemari obat-obatan untuk mencari sesuatu yang bisa disumbangkan untuk saudaranya yang sedang menderita.

Surat kabar, majalah, radio dan televisi segera membuka dompet dan posko pengumpul bantuan. RT dan RW, organisasi pemuda dan organisasi masyarakat beramai-ramai membuka posko yang serupa. Semuanya secara spontan, tanpa menunggu perintah segera *cancel taliwanda* mengembangkan prakarsa menyiapkan segala sesuatu untuk membantu.

Sungguh menyejukkan, Presiden RI yang sedang meninjau musibah yang sama di Nabire, Papua, langsung memberi instruksi Wakil Presiden dan Menteri-menterinya yang ada di Jakarta untuk segera mengambil langkah-langkah darurat bahkan terbang langsung ke Banda Aceh melihat akibat gempa yang sangat dahsyat tersebut.

Presiden sendiri membawa kesejukan, tanpa kembali ke Jakarta, langsung terbang ke Banda Aceh mengambil langkah-langkah konkrit yang membesarkan hati. Dekat dengan rakyat dan memberi kesempatan siapa saja untuk mengulurkan tangannya membantu seadanya dengan fasilitas kemudahan dalam keterbatasan yang segalanya bersifat darurat. Rakyat dan keluarga Indonesia hatinya *trenyuh* merasa mendapat orang tua yang sungguh



sayang kepada anak-anaknya.

Rangkulan kasih sayang Bapak Presiden kepada seorang tua yang kehilangan anak dan kerabatnya menimbulkan rasa hanyut yang sungguh mendebarkan. Pangkuan kasih sayang Ibu Ani Yudhoyono kepada dua orang anak yang terlunta-lunta tidak tahu kemana mencari orang tuanya menimbulkan rasa iba yang sangat mendalam. Lalu lalang anak-anak yang berpakaian seadanya mencari orang tua dan saudaranya di kerumunan massa yang tidak menentu menimbulkan tanda tanya apakah si anak masih punya orang tua atau sedang kebingungan dan kesepian dalam keramaian?

Pemandangan yang memilukan itu membuat Bupati perempuan berhati mulia dari Karanganyar tidak dapat menahan emosinya. Dengan suara seakan histeris menelepon dan menjerit agar pokok-pokok gagasannya segera disampaikan kepada Presiden, baik secara langsung maupun melalui media massa. Beliau berharap agar pemerintah mengambil langkah konkrit dan perhatian yang tinggi kepada anak-anak dan remaja yang kehilangan orang tua dan sanak kerabatnya.

Perhatian kepada mereka hendaknya menjadi prioritas yang utama. Ibu Hj Rina Iriani, MEd, MHum, Bupati Karanganyar, yang biasanya tenang itu terusik naluri keibuannya untuk secara spontan menyanggupkan diri menjadi ibu angkat atau ibu asuh dari anak-anak atau remaja harapan bangsa yang kehilangan orang tuanya. Beliau dengan keluarganya, baik selama masih menjabat, maupun nanti setelah tidak menjabat lagi, siap untuk memberi yang terbaik kepada anak asuhnya itu.

Memenuhi kebutuhan anak sehari-hari, dan yang lebih penting dari itu, sebagai mantan guru yang berhasil, memberikan kepada anak-anak itu



pendidikan dan pengajaran yang memadai dan bermutu agar pada masa dewasanya nanti bisa ikut membangun tanah air dan bangsanya menjadi bangsa yang terhormat dan jaya.

Bahkan, Ibu yang baru-baru ini merekam suaranya yang merdu dalam VCD dengan langgam campur sari, menyatakan bahwa hasil rekaman bersama penyanyi dan pencipta lagu terkenal Didi Kempot itu bukan memperkaya diri sendiri, tetapi seluruhnya akan disumbangkan untuk meningkatkan mutu dan kesempatan pendidikan anak-anak di kabupatennya. Siapa tahu bahwa, apabila diijinkan, anak dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang menyatu dan menjadi penduduk Karanganyar bisa menikmati hasil penjualan rekaman itu sebagai pendukung dana pendidikannya ?

Jeritan dan simpati tidak saja datang dari Bupati Karanganyar yang nyaris histeris dan menangis, tetapi juga menggelitik tetangganya Bupati Sragen, Bapak Untung Wiyono. Bupati yang terkenal dekat dengan rakyatnya seperti anak sendiri itu merasa bahwa rakyat Nanggroe Aceh Darussalam (BAD) adalah juga anak-anaknya sendiri. Bupati yang sering keliling desa, tidur di desa dan tidak segan-segan minum kopi dengan penduduk kebanyakan dan miskin di desanya itu tergelitik hatinya.

Dengan spontan segera mengumpulkan dana dari para penderma, penduduk di kabupatennya, serta merogoh kantong sendiri sehingga dalam waktu kurang dari satu minggu langsung mengirim sumbangan dana tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan satu regu sukarelawan langsung ke wilayah yang sedang menderita. Bantuan itu kelihatannya kecil, tetapi kalau dilihat bahwa penduduk di daerahnya bukan kaya seperti penduduk Jakarta, sumbangan sebesar itu bagi kabupaten Sragen merupakan sumbangan yang sangat besar jumlahnya.



Banyak lagi Bupati dan Gubernur yang menjadi terlalu panjang untuk ditulis dalam ruang yang sangat terbatas ini tergugah hatinya dan bangkit solidaritasnya. Tumpukan bantuan menggunung pula dari lembaga swadaya masyarakat, sekolah, universitas dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

Di banyak tempat di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan yakin kota-kota lainnya, bahkan di tingkat RT, RW, dan pedesaan, gerakan solidaritas itu muncul tanpa komando yang berbelit-belit. Hasilnya sungguh menakjubkan. Banyak tumpukan barang, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, berkarung-karung dengan kasat mata terlihat numpuk di pinggir jalan dan di gudang-gudang Posko yang dibentuk rakyat.

Di pusat Posko Nasional di Pangkalan Halim Perdana Kusuma, juga di Posko di Pelabuhan Tanjung Priok, barang-barang bantuan masyarakat menumpuk siap diangkut ke tempat-tempat yang penduduknya sedang menderita. Menko Kesra mengabarkan bahwa sumbangan serupa juga menumpuk di pelabuhan udara dan pelabuhan laut kota lain di seluruh Indonesia. Bukan main, gempa dahsyat dan tsunami yang terjadi telah membangkitkan solidaritas bangsa, persatuan dan kesatuan yang luar biasa.

Sementara itu Pengurus Yayasan Damandiri yang sangat peduli terhadap masalah sumber daya manusia sebagai pemeran pembangunan, terutama pemeran pembangunan kembali Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang porak poranda segera mengambil langkah untuk menyiapkan tenaga bermutu yang mampu bekerja keras membangun kembali daerah yang sebagian rata dengan tanah tersebut.

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam, ingatan tertuju kepada



ratusan, mungkin ribuan mahasiswa dari NAD yang sedang menyelesaikan kuliahnya di berbagai Perguruan Tinggi di Jawa dan Bali. Karena itu diputuskan untuk mengajak 25 Rektor Perguruan Tinggi di kawasan Jawa Bali yang menjadi mitra kerja Yayasan untuk bersama-sama menolong mahasiswa asal Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang kehilangan orang tua atau sanak keluarganya.

Para Rektor dari 25 Perguruan Tinggi itu diminta untuk segera mengadakan inventarisasi dan mengirim nama-nama mahasiswa asal NAD, khususnya mahasiswa semester ke tujuh dan ke delapan, atau mahasiswa yang hampir menyelesaikan studi, untuk mendapatkan kemudahan dan dibantu dengan dukungan pembayaran SPP-nya. Dana bantuan SPP akan disediakan oleh Yayasan Damandiri. Untuk tahun 2005 telah berhasil dikumpulkan tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- yang siap disalurkan untuk meringankan pembayaran SPP selama tahun 2005.

Simpati dan solidaritas tersebut diatas ternyata tidak kenal bangsa dan agama. Bantuan dari bangsa-bangsa sahabat kita mengalir sama derasnya dengan bantuan yang berasal dari bangsa sendiri. Dukungan solidaritas ini jelas memberikan perasaan sejuk penuh harapan.

Langkah-langkah strategis yang berlandaskan persatuan dan kesatuan kitanya hanya akan memperkokoh persaudaraan bangsa dan kerjasama antar bangsa. Keluarga Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak menderita sendirian. Indonesia tidak menderita sendirian. Dukungan yang mengalir dengan ikhlas dari seluruh pelosok desa dan kampung, jeritan yang penuh rasa haru dan *trenyuh* dari dinding-dinding rumah sederhana sampai gedung mewah cemerlang, menambah keyakinan masa depan Indonesia bakal lebih cerah dalam persatuan dan kesatuan.



Dukungan yang mengalir tanpa harus diawali dengan meminta-minta dari sahabat dunia memberi rasa bangga bahwa bangsa Indonesia ternyata masih mempunyai banyak sahabat yang setia. Semoga semuanya menjadi perekat persatuan yang tidak tergoyahkan dan memberi semangat yang tinggi untuk tetap tawakal kepada saudara-saudara kita di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

D





BIDAN MANDIRI SEBAGAI UJUNG TOMBAK POSYANDU

Para bidan dan sukarelawan pejuang kaum wanita beberapa waktu lalu berkumpul di Bali. Dua hari pertama, dengan prakarsa Yayasan Damandiri, Yayasan Indra, Lembaga Indonesia untuk Pengembangan Manusia, Unair, Institute Pertanian Bogor (ITB), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Bukopin serta Bank Syariah Mandiri diselenggarakan pertemuan dengan para bidan dan pimpinan perguruan tinggi terpilih untuk mengembangkan strategi mendukung upaya menurunkan tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan, meningkatkan kualitas bidan, serta sekaligus membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Pertemuan itu dilanjutkan dengan pertemuan regional Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI) dan juga lokakarya dengan topik serupa, yang dihadiri oleh utusan dari wilayah Asia dan Pasifik.

Upaya pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan bidan tidak bisa dipisahkan. Bidan adalah ujung tombak pembangunan keluarga sejahtera dari sudut kesehatan dan pemberdayaan lainnya. Bidan menempati posisi yang strategis karena biasanya di tingkat desa



merupakan kelompok profesional yang jarang ada tandingannya.

Masyarakat dan keluarga Indonesia di desa, dalam keadaan hampir tidak siap tempur, menghadapi ledakan generasi muda yang sangat dahsyat. Bidan dapat mengambil peran yang sangat penting dalam membantu keluarga Indonesia mengantar anak-anak dan remaja tumbuh kembang untuk berjuang membangun diri dan nusa bangsanya.

Berkat upaya gerakan KB dan Kesehatan di masa lalu, yang gegap gempita, anak-anak dibawah usia 15 tahun jumlahnya dapat dikendalikan. Sejak tahun 1970 jumlah anak-anak tersebut belum pernah melebihi 60 – 65 juta. Tetapi, sebaliknya, anak-anak usia remaja, yaitu 15 – 29 tahun, bahkan usia 30 – 60 atau 15 – 65 tahun jumlahnya meningkat dalam kelipatan yang berada diluar perhitungan banyak pihak. Phenomena tersebut, biarpun bisa dilihat secara nyata setiap hari, belum banyak menggugah perhatian, kecuali kalau terjadi kecelakaan dalam proses kehidupan anak muda itu.

Kesempatan hamil dan melahirkan bertambah jarang, pengalaman keluarga merawat ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak batita, atau anak usia tiga tahun, dalam suatu keluarga, juga bertambah jarang. Kalau terjadi peristiwa kehamilan atau kelahiran dalam suatu keluarga, hampir pasti kemampuan dan mutu anggota keluarga merawat anggotanya yang sedang hamil atau melahirkan juga menjadi kurang cekatan dan mutunya rendah. Padahal keluarga masa kini, yang bertambah modern dan *urban*, menuntut kualitas pelayanan yang bermutu tinggi.

Keluarga masa kini juga menuntut hidup tetap sehat dalam waktu yang sangat lama karena usia harapan hidup yang bertambah tinggi. Karena itu, sebagai ujung tombak dalam bidang kesehatan, bidan dituntut untuk



berperan sebagai *ahli detektor* awal untuk apabila menemukan suatu kondisi kesehatan yang mencurigakan dari anggota suatu keluarga, segera memberi pertolongan dini, atau memberi petunjuk untuk rujukan.

Kalau seorang bidan tidak mampu memberikan petunjuk kepada suatu keluarga, karena penyakit yang diderita seorang anggotanya berada diluar wewenangnya, seorang bidan segera bisa mengirim anggota keluarga yang bersangkutan ke tingkat referal yang lebih tinggi. Dengan demikian, para bidan, dalam jaman yang modern sekarang ini, memiliki peran luar biasa untuk memelihara kesehatan keluarga di tingkat pedesaan dan rumah tangga. Para bidan bisa menjadi *detektor* dan sekaligus *advokator* yang ampuh.

Alasannya sederhana. Perubahan sosial budaya dan ciri kependudukan tersebut diatas mengundang perubahan peran tenaga-tenaga pembangunan,



seperti bidan, yang lebih tinggi dalam mengantar anak-anak muda dan remaja membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Kalau di masa lalu para bidan mempunyai peran yang relatif terbatas dalam melayani proses reproduksi seseorang yang kondisinya kurang baik, dan berbahaya, di masa depan proses reproduksi generasi muda dan pasangan muda lebih jarang terjadi. Tetapi tidak kalah berbahayanya dan bahkan mungkin saja terjadi jauh sebelum seseorang sesungguhnya siap dengan proses reproduksinya. Remaja tersebut perlu mendapat dukungan dengan tuntutan kualitas yang sangat tinggi, sehingga peran bidan juga menjadi lebih sukar dan perlu dukungan semua pihak dengan baik.

Karena tuntutan yang demikian tinggi, bidan tidak bisa santai menanggapinya. Anak muda dan remaja masa depan menuntut kualitas prima karena penentuan pilihan pelayanan yang dikehendaknya tidak lagi pada unsur pelayanan, yaitu para bidan, tetapi pada anak muda, remaja dan pasangan muda masing-masing.

Tuntutan atas peningkatan kualitas pelayanan itu mencuat pada akhir abad yang lalu karena keluarga dan penduduk merasa bahwa kompetisi masa depan hanya bisa dimenangkan bukan melalui “*krubutan*” dengan pasukan orang banyak, tetapi melalui pelayanan yang bermutu. Keluarga dan penduduk masa depan menghendaki pelayanan dengan standard internasional yang bermutu, tahan banting dan karena usia harapan hidup yang panjang, tuntutan atas pelayanan bermutu itu akan berlangsung untuk masa yang sangat lama.

Sejalan dengan tuntutan itu para pemimpin dunia meningkatkan komitmennya melalui pencanangan deklarasi *Millenium Development Goals*



(MDGs) pada Sidang Khusus PBB di New York pada akhir tahun 2000. Dengan adanya pencanangan tersebut para pemimpin dunia sepakat meningkatkan upaya pembangunan sosial kesejahteraan dengan delapan target utama. Masing-masing target merupakan pengejawantahan dari upaya meningkatkan mutu, harkat dan martabat umat manusia untuk masa perjuangan sepanjang hidup manusia.

Ada delapan target dan sasaran yang harus dicapai secara terpadu. Indonesia yang ikut menanda tangani deklarasi PBB pada akhir tahun 2000 itu ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian target-target tersebut. Untuk mencapai sasaran dan target-target tersebut Indonesia harus menempatkan pembangunan dan pemberdayaan seperti bidan, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan tenaga pemberdayaan masyarakat pada posisi sangat penting di lapangan, di pedesaan.

Peranan tenaga-tenaga pembangunan tersebut sangat tinggi dan mutlak. Peranan bidan misalnya, sekaligus merupakan sumbangan yang sangat tinggi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, yaitu dalam rangka hidup sehat dan sejahtera. Lebih-lebih lagi nampak sekali bahwa peranan bidan sangat penting dalam memberi dorongan agar keluarga yang isterinya yang sedang hamil mendapat perhatian dalam bidang kesehatan pada umumnya dan kemampuan mengembangkan ekonomi keluarga. Tujuannya adalah agar setiap keluarga mempunyai kemampuan memelihara kesehatannya, terutama kesehatan isterinya.

Apabila kemampuan keluarga memadai, dan isteri atau ibu dalam rumah tangga sedang hamil, akan mendapat masukan makanan dengan gizi yang cukup. Dengan gizi yang baik janin yang dikandungnya akan tumbuh menjadi bayi yang sehat. Di kemudian hari, apabila janin sudah dilahirkan



berupa bayi, maka bayi tersebut akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Kalau mendapat dukungan keluarga yang sejahtera, maka anak itu akan tumbuh kembang dengan baik. Selanjutnya keluarga yang lebih mampu secara ekonomis dapat mengirim anaknya ke sekolah dan akhirnya menjadi putra bangsa yang dapat dibanggakan.

Karena itu dalam kehidupan keluarga yang sederhana, bersama dengan kekuatan pembangunan lainnya di pedesaan, para bidan dapat mempengaruhi masyarakat dan pemimpin sekelilingnya untuk memberi perhatian kepada keluarga kurang mampu dengan dukungan pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah agar apabila isterinya mengandung dan melahirkan, keadaan rumah tangganya lebih baik. Peranan sebagai ujung tombak dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi rumah tangga tersebut menjadi sangat penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia yang sejak awal tahun 1990 menjadi acuan PBB, khususnya United Nations Development Programme (UNDP).

Dengan adanya kesepakatan MDGs pada akhir tahun 2000, bidan makin memegang peranan multi kompleks yang sangat penting, terutama di daerah-daerah dimana kualitas manusia dan perangkat pelayanan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk generasi muda, makin perlu ditingkatkan.

Generasi muda masa kini menghadapi masa depan yang cukup berat. Bangsa yang masih miskin sukar sekali memenuhi tuntutan kesehatan dan pendidikan sebagai prasarat yang sangat penting bagi generasi muda untuk maju di masa depan. Karena itu peranan bidan untuk generasi muda menjadi sangat multi kompleks, khususnya dalam memerangi kemiskinan tentang informasi kehamilan dan masalah kompleks yang ada disekitarnya.



Untuk itu cara kerja bidan juga harus disesuaikan. Misalnya, dalam bertindak sebagai salah satu pemegang peran yang penting di pedesaan bidan harus menyesuaikan cara penanganan kasus ibu hamil dan melahirkan. Pertama-tama bidan bisa menghimbau ibu hamil untuk datang kepadanya bersama suami masing-masing, atau sekaligus bersama anggota keluarga lainnya.

Untuk memberi motivasi suami dan anggota agar mau datang bersama isterinya, seorang bidan bisa memberi bonus ekstra seperti pemeriksaan kesehatan dasar kepada suami dan anggota lainnya. Sebagai contoh seorang suami yang mengantar isterinya bisa mendapatkan pemeriksaan tekanan darah secara cuma-cuma. Dari pemeriksaan darah dapat diketahui apakah seorang suami menderita tekanan darah tinggi atau kemungkinan adanya penyakit yang membahayakan.

Apabila ternyata dugaan itu benar, seorang bidan dapat menyarankan kepada suami yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam di Puskesmas atau dokter. Atau apabila ternyata suami-isteri itu menganut pola hidup yang kurang sehat, bidan dapat menganjurkan agar suami isteri itu merubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang sehat sejahtera.

Misalnya, kalau seorang suami biasa merokok, dianjurkan agar berhenti merokok karena kalau terus merokok bisa mengganggu janin yang dikandung isterinya. Kalau seorang suami kurang olah raga, bisa dianjurkan untuk olah raga agar sehat dan bisa menyaksikan anaknya tumbuh kembang dengan baik. Kalau seorang suami mengidap kemungkinan sakit seperti diabetes, darah tinggi atau lainnya, bisa dirujuk ke Puskesmas untuk mendapat perawatan yang memadai.



Bersama keluarga yang isterinya sedang hamil bidan dapat mengambil peranan menghidupkan kemampuan komunitas dan budaya masyarakat untuk memberdayakan generasi muda, termasuk pasangan usia subur, dan keluarganya, untuk bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya terhadap keberadaan pelayanan reproduksi dan kesehatan umum lainnya. Pelayanan reproduksi dan kesehatan umum itu bisa dimulai oleh bidan dengan menyegarkan Posyandu, dan selanjutnya menghidupkan rujukan pelayanan di tingkat Polindes, dokter praktek, Puskesmas, dan rumah sakit.

Dengan Posyandu yang disegarkan dan aktif menolong masyarakat sekitarnya, bisa diharapkan cakupan yang dapat disumbangkan oleh bidan bisa bertambah tinggi. Bidan dapat dengan mudah melaksanakan peranan yang makin multi kompleks bersama pemimpin masyarakat yang ada di sekitarnya.

Bidan bahkan bisa menjadi ujung tombak bagi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk bangkit kembali. Bidan dapat menjadi pemimpin masyarakat desa yang sangat diharapkan karena kemampuan dan dedikasinya mulai dari seseorang masih berupa janin dalam kandungan ibunya, sampai seseorang menjadi manusia lanjut usia atau lansia yang siap menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah.

D

MENGHIDUPKAN KEMBALI POSYANDU

Serangan kasus polio dan berbagai gangguan kesehatan, keawatiran masyarakat tentang mengendornya pelayanan KB di pedesaan yang disertai jeritan yang merindukan pelayanan KB yang cekatan tidak cukup dijawab dengan retorika. Karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sigap telah memberi instruksi melalui Menko Kesra dan Menteri Dalam Negeri agar PKK segera menghidupkan kembali Posyandu sampai ke desa-desa dan pedukuhan.

Petunjuk Presiden itu sangat tepat. Sesungguhnya rakyat di desa dan pedukuhan mempunyai potensi yang sangat besar untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan asalkan mendapat komitmen dukungan yang besar dari pemerintah dan aparat terkait. Dukungan itu sederhana, karena rakyat sendiri sanggup bekerja keras dan tidak memerlukan dana yang berlebihan. Rakyat bisa membiayai berbagai kegiatan secara gotong royong dan biasanya sanggup berpartisipasi dengan baik.

Pos Pelayanan Terpadu atau populer dengan nama Posyandu dilahirkan sekitar tahun 1983. Pos Pelayanan Terpadu itu merupakan keterpaduan dari berbagai pelayanan yang dikembangkan oleh Kelompok



Akseptor KB yang melayani kebutuhan kontrasepsi bagi anggotanya di pedesaan. Pos-Pos KB tersebut semula hanya menjadi penyalur kontrasepsi pil, kondom atau sekedar tempat untuk saling membandingkan pengalaman ber-KB antar anggotanya.

Semula pos-pos itu mulai muncul pada akhir tahun 1970-an, yaitu semenjak makin banyak pasangan usia subur ikut ber-KB. Pos-pos itu biasanya dibina oleh para anggota Akseptor KB senior. Untuk mendapatkan dukungan kredibilitas yang tinggi pos-pos pelayanan KB itu kemudian berkembang menjadi Kelompok Akseptor KB dan dipimpin oleh isteri kepala desa, atau isteri Kepala Kampung, atau isteri Ketua RW atau Ketua RT, sesuai dengan tingkatan pos atau kelompok itu berada.

Pada awal tahun 1980-an kelompok dan pos-pos tersebut berkembang dengan kecepatan dan jumlah yang sangat besar. Hampir di setiap desa dan pedukuhan telah ada Kelompok Akseptor dengan Pos KBnya. Kegiatannya juga bertambah bervariasi. Karena para akseptor banyak sekali berhubungan dengan bidan dan dokter, kegiatan yang segera muncul di setiap kelompok dan posnya adalah kegiatan yang hubungannya sangat erat dengan bidang kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak-anaknya. Maka, kegiatan yang biasanya muncul di kelompok akseptor adalah kegiatan menimbang ibu hamil dan atau menimbang anak-anak balita.

Munculnya keterpaduan program Gizi dan KB berkat kerjasama antara BKKBN dan Departemen Kesehatan pada awal tahun 1980-an menambah semarak kegiatan menimbang bayi dan balita serta penggunaan kartu menuju sehat. Ibu-ibu balita, yaitu ibu-ibu yang mempunyai anak balita, sudah ber-KB maupun belum ber-KB, diundang pula untuk berkunjung ke Pos KB yang dikelola oleh ibu-ibu akseptor KB.



Mereka datang untuk menimbang anak-anaknya, dan sebagai pasangan yang sangat subur, merekapun diajak untuk mengikuti KB seperti para pengelola pos-pos KB di desa tersebut yang biasanya adalah akseptor KB yang sudah lestari.

Kegiatan awal dari keterpaduan program KB dan kesehatan makin luas karena pada pos-pos tersebut diberikan juga imunisasi untuk bayi dan anak balita. Pelaksanaan kegiatan medis tersebut diselenggarakan oleh para bidan atau dokter yang menjadi petugas dan pengawas kegiatan medis pada desa yang bersangkutan. Dokter dan bidannyapun berasal dari berbagai instansi, sebagian besar dari Dinas Kesehatan dan banyak pula yang berasal dari dokter angkatan yang menyelenggarakan bhakti sosial bersama masyarakat setempat.

Program yang dilayani pos-pos ini menarik perhatian Departemen



Kesehatan dan aparatnya. Dinas-dinas daerah ada pula yang mengambil prakarsa untuk mengembangkan pelayanan kesehatan melalui kegiatan kesehatan dengan pendekatan yang sama, terlepas dari kegiatan Pos-pos yang diselenggarakan oleh Pos KB yang dikelola oleh Kelompok Akseptor KB dan anggotanya. Demikian juga PKK yang ada di daerah-daerah pedesaan. Melalui kelompok PKK di desa-desa mereka pun mengembangkan program dan kegiatan lain yang sangat bervariasi untuk anggotanya.

Pada awal April 1983 Kepala BKKBN dr. Suwardjono Surjaningrat diangkat menjadi Menteri Kesehatan RI. Pada saat yang bersamaan Kepala BKKBN diserahkan kepada Dr. Haryono Suyono. Kegiatan Kelompok KB lebih digalakkan lagi dengan dukungan kampanye secara besar-besaran.

Begitu juga, Menteri Kesehatan RI, yang sebelumnya memimpin kegiatan di BKKBN memang sudah sangat biasa dengan kegiatan lapangan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Segera setelah memimpin Departemen Kesehatan program dan kegiatan kesehatan pedesaan disebar luaskan dengan lebih intensif. Pelayanan Puskesmas diperluas ke pedesaan dan pedukuhan dengan intensitas yang sangat tinggi.

Untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan dua jenis program dengan sasaran yang sama, pada peringatan Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni 1983 disepakati untuk meningkatkan koordinasi penanganan KB dan Kesehatan di pedesaan. Koordinasi itu diwujudkan dengan menggabungkan pos-pos KB dan pos kesehatan yang telah ada menjadi **pos pelayanan terpadu (Posyandu)** untuk KB dan kesehatan. Pada puncak acara peringatan Hari Keluarga Nasional itu ditanda tangani kerjasama dan MOU antara Kepala BKKBN dan Menteri Kesehatan yang melahirkan adanya Posyandu dengan pelayanan pokok bidang KB dan Kesehatan.



Karena anggota-anggota PKK juga adalah anggota Posyandu dan banyak Posyandu dikelola oleh pemimpin-pemimpin PKK di desa dan pedukuhan, pada pengembangan berikutnya PKK merupakan pengelola yang sangat terpercaya dari berbagai Posyandu di pedesaan dan pedukuhan.

Kegiatan bidang KB dan kesehatan merupakan sebagian dari banyak sekali kegiatan PKK di setiap desa. Dengan memberikan PKK kesempatan untuk menghidupkan kembali Posyandu diharapkan masalah KB dan kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak, diharapkan kekosongan yang akhir-akhir ini terjadi dapat disegarkan kembali.

D



MENGHIDUPKAN KEMBALI BINA KELUARGA BALITA

Kasus-kasus polio atau dugaan penyakit dengan tanda-tanda seperti serangan virus polio di berbagai daerah, gangguan busung lapar atau tanda-tanda anak balita kekurangan gizi, dan berbagai gangguan kesehatan anak balita lainnya, dalam jaman serba transparan dan media massa yang spontan pemberitaannya, telah meresahkan masyarakat luas.

Departemen Kesehatan dengan dinas dan jajaran kesehatan daerah yang dipertanggung jawabkan kepada Bupati atau Walikota, kalau mereka mempunyai komitmen yang tinggi, praktis harus lari terbirit-birit untuk melakukan cek dan recek. Mereka harus segera mengambil tindakan dalam keterbatasan kemampuan yang tersedia di daerahnya.

Dukungan dari tingkat pusat informasinya mengalir dengan cepat, tetapi keadaan tanah air dengan penderita yang tersebar sampai ke pelosok pedesaan, tidak mudah dijangkau. Biaya dan transportasi untuk mengirim obat dan peralatan yang dibutuhkan di daerah terpencil, yang biasanya sangat miskin dan menderita, tidak selalu tersedia dengan baik. Disamping itu, kekawatiran masyarakat tentang mengendornya pelayanan KB dan kesehatan



di pedesaan, setelah dicek dengan jujur, ternyata bukan berita bohong.

Bidan di Desa yang pernah mencapai jumlah 70.000 ribu dan siap siaga di hampir semua desa di Indonesia, menurut keterangan Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat dan beberapa pengurus IBI Propinsi, hanya tinggal 22.000 orang bidan saja yang masih aktif di tempatnya di pedesaan.

Ibu-ibu PKK, jajaran Petugas Lapangan KB (PLKB) dan bidan di Desa yang biasanya melayani Pos Pelayanan Terpadu, atau populer dengan nama Posyandu, di pedesaan, tidak serajin jaman dulu melayani konsultasi sehabis kegiatan penimbangan anak balita dan ibu hamil.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dilahirkan sekitar tahun 1983 sebagai perpaduan Pos Pelayanan KB dan Pos Pelayanan Kesehatan, sangat sedikit yang masih hidup dan melayani konsultasi bagi orang tua yang





membawa anak-anak balita, utamanya anak-anak dibawah umur tiga tahun (batita) ke pertemuan rutin di desanya.

Pos-Pos tersebut, yang semula melayani penyaluran kontrasepsi pil, kondom atau memberi bantuan penimbangan anak batita atau balita dan ibu hamil, kegiatannya pudar. Kegiatan lanjutan bersama kelompok di desanya untuk membina anak balita dalam gerakan Bina Keluarga Balita juga tidak banyak lagi terdengar.

Padahal, pembinaan anak balita adalah satu proses persiapan pemberdayaan sumber daya manusia yang sangat penting. Di negara-negara maju pembinaan anak usia dini, atau anak dini usia, biasanya disingkat PADU – pembinaan anak dini usia -, dilakukan dengan sangat intensif dan mendapat perhatian yang sangat tinggi.

Alasannya bukan karena kedua orang tua mereka bekerja, tetapi justru pada usia dini tersebut anak-anak berada pada posisi paling ideal menerima dukungan untuk mengembangkan kepribadian dan jati dirinya. Dengan pemberdayaan yang baik pada dini usia tersebut akan dihasilkan anak-anak yang masa depannya akan lebih cerah karena mereka menjadi orang dewasa yang kreatif dan mempunyai rasa percaya diri yang kuat.

Di masa lalu posyandu-posyandu sangat terlibat dalam membina keluarga balita, atau keluarga yang mempunyai anak balita. Bersama dengan para alim ulama, pemimpin ibu-ibu di pedesaan, baik yang tergabung dalam PKK, NU maupun Muhammadiyah, sangat aktif membina keluarga balita tersebut.

Di masa lalu kelompok-kelompok itu, bersama-sama dengan



pembinaan keluarga balita, melakukan juga kegiatan untuk memperdalam pengetahuan dan praktek keagamaan. Mereka rajin belajar menjadi *guru ngaji* dengan mempelajari sistem yang mudah dan menarik. Mereka bukan saja belajar untuk diri sendiri, tetapi belajar methodologi mengajar agar bisa memberi pelajaran kepada anak-anak mereka yang masih balita.

Karena anggota-anggota PKK juga adalah anggota Posyandu dan banyak Posyandu dikelola oleh pemimpin-pemimpin PKK di desa dan pedukuhan, ada baiknya kalau petunjuk Presiden kepada Menko Kesra untuk menghidupkan Posyandu sekaligus dipadukan dengan kegiatan menghidupkan kembali Gerakan Bina Keluarga Balita.

Gerakan ini merupakan gerakan masyarakat untuk merangsang dan membantu agar keluarga yang mempunyai anak balita dapat lebih sering mengadakan pertemuan bersama untuk sosialisasi tumbuh kembang anak-anaknya. Dalam pertemuan sebaiknya diberikan pendampingan para ahli, utamanya ahli tumbuh kembang anak, bidan, psycholog, ahli-ahli kesehatan anak, secara reguler, agar bisa membantu memantau tumbuh kembang anak-anak batita, atau anak dibawah usia tiga tahun, atau anak-anak dibawah usia lima tahun.

Dalam pertemuan secara teratur di kelompoknya di pedesaan, anak-anak batita dapat dirangsang belajar bersama-sama agar dapat diketahui kalau-kalau ada kelainan yang segera dapat dirujuk ke tempat-tempat yang lebih baik.

Dukungan gerakan ini kepada keluarga kurang mampu, terutama dalam kelompok di pedesaan, merupakan pertolongan dan daya dukung yang sangat kuat untuk ikut memelihara persatuan dan kesatuan di lingkungan pedesaan.



Pemeliharaan persatuan dan kesatuan di kalangan kecil tersebut merupakan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama sangat relevan sebagai imbangan terhadap maraknya Pilkada yang kadang-kadang terasa seakan-akan seperti merobek-robek persatuan dan kesatuan itu.

Kalau Pilkada dilakukan setiap tahunnya untuk 150 – 200 kabupaten dan kota, gaungnya barangkali akan menjadi lebih sejuk kalau Posyandu dan kegiatannya, Gerakan Keluarga Balita yang menyatukan keluarga dengan anak balita, serta upaya-upaya gotong royong lainnya, dihidupkan kembali untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Rakyat kecil di pedesaan barangkali akan sangat berterima kasih kepada pemerintah kalau disamping ada pertunjukkan demokrasi di semua media nasional dan lokal, ada pula pertunjukkan yang tidak kalah pentingnya dalam memelihara kesehatan, pelayanan KB dan pemberdayaan anak batita yang sangat mereka sayangi. Mereka mencintai demokrasi, tetapi merekapun juga mengharapkan anak cucunya bisa menikmati masa depan di alam demokrasi dengan segala nilai positifnya.

D



MENCERMATI LEDAKAN LANSIA

Setiap tanggal 29 Mei, Indonesia memperingati Hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional. Lansia menjadi fenomena menarik karena keberhasilan pembangunan bidang kependudukan dan kesehatan di Indonesia. Keberhasilan itu memperpanjang usia, kualitas, dinamika serta kesiapan penduduk. Karena keberhasilan itu, pada awal abad ke 21 ini struktur penduduk Indonesia makin dewasa dan tua.

Jumlah penduduk anak-anak tetap saja bisa dipertahankan sesuai dengan jumlah di awal tahun 1970-an. Tetapi jumlah penduduk dewasa membengkak dua sampai tiga kali lipat dibandingkan dengan keadaannya pada tahun 1970 tersebut. Demikian juga jumlah penduduk lansia, atau penduduk berusia 60 tahun keatas, atau 65 tahun keatas.

Pada tahun 1970 jumlah penduduk diatas usia 65 tahun hanya sekitar 3 juta jiwa, sekarang diproyeksikan telah mencapai jumlah tidak kurang dari 12 - 13 juta jiwa, atau peningkatan sebanyak empat kali lipat dibandingkan dengan keadaannya pada tahun 1970. Kalau dihitung mulai usia diatas 60 tahun, jumlah penduduk telah meningkat dari sekitar 5 juta



menjadi sekitar 18-20 juta jiwa.

Langkanya penduduk lanjut usia pada tahun 1970 semata-mata karena penduduk Indonesia pada waktu itu mempunyai usia harapan hidup, atau usia rata-rata sekitar 50 tahun, atau kurang. Daerah-daerah tertentu, yang tingkat kesehatan dan lingkungannya kurang memberi dukungan, mempunyai usia harapan hidup dibawah 45 tahun, yaitu rata-rata penduduknya akan sudah meninggal dunia sebelum sempat memperingati ulang tahunnya yang ke 45.

Kita mengetahui bahwa rata-rata tingkat pendidikan Kepala Keluarga Indonesia pada tahun 1970 umumnya masih rendah. Sebagian besar kepala keluarga di Indonesia hanya buta huruf. Pada waktu ini telah meningkat menjadi rata-rata berpendidikan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas.

Karena perkembangan globalisasi dan pendidikan yang cepat, yang diiringi dengan kemajuan modernisasi, tingkat pertumbuhan keluarga di Indonesia masih akan terus naik dan ternyata sudah jauh lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan penduduk Indonesia.

Pada awal abad 21 jumlahnya mencapai sekitar 50-55 juta keluarga dan masih akan berkembang dengan kecepatan yang relatif tetap tinggi. Kalau dilihat dalam perspektif jangka panjang, jumlah penduduk lanjut usia mengalami *kenaikan sebesar 96 persen* selama *20 tahun*. Pada waktu yang sama *jumlah penduduk seluruh Indonesia* mengalami kenaikan sebesar *42 persen*. Dengan demikian jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia *meningkat lebih dari dua seperempat kali lipat* dibandingkan kenaikan jumlah penduduk dalam waktu yang sama.



Pembangunan yang berhasil dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi pada umumnya, telah memungkinkan keluarga Indonesia melakukan pemeliharaan kesehatan dengan lebih baik. Walaupun belum sempurna, tetapi penyakit-penyakit degeneratif telah dapat diatasi. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, mereka umumnya bisa segera mendapat pengobatan, sehingga penyakit-penyakit yang apabila tidak ditangani bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih rumit telah dapat diatasi.

Penduduk dewasa yang biasanya tidak mencapai umur yang relatif panjang karena gangguan kesehatan yang sederhana menjadi lebih mampu bertahan dan bisa menginjak usia yang lebih panjang. Namun kualitas kesehatan mereka sesungguhnya masih sangat rendah sehingga potensi penduduk lanjut usia tersebut belum bisa dianggap ideal dan mampu melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan.

Kejutan demografi berupa peningkatan jumlah dan proporsi lansia tersebut belum seluruhnya mendapat perhatian masyarakat. Namun kita beruntung karena pada tahun 1999 sudah berhasil disepakati Undang-undang tentang penduduk lanjut usia. Berbeda dengan pengertian sebelumnya, bahwa lansia dianggap tidak berdaya dan ditampung oleh keluarga atau ditempatkan di panti jompo, dalam UU tersebut mulai dikenal istilah pemberdayaan untuk lanjut usia. Pemberdayaan tersebut mempunyai tiga perspektif yang menarik.

Pertama, bagaimana membina dan memberdayakan lansia yang berada dalam lingkungan keluarga, agar tetap mampu bekerja, sehingga keluarganya dan kita semua bisa memberikan kepada mereka peluang dan kesempatan untuk ikut terus membangun keluarga dan masyarakat yang sejahtera;



Kedua, bagaimana membina dan memberdayakan lansia yang berada di luar lingkungan keluarga, khususnya yang masih mampu bekerja dan masih bisa memberikan sumbangan dalam pembangunan yang bersifat lokal maupun nasional;

Ketiga, bagaimana mengembangkan upaya membantu penanganan lansia yang sudah tidak mampu lagi bekerja dan harus menjadi tanggung jawab keluarganya, masyarakat dan atau pemerintah.

Karena kenyataan masih banyak penduduk lanjut usia yang dengan pembinaan dan pemberdayaan seperlunya dapat memulai karier yang kedua. Dan lebih dari itu, karier kedua tersebut mungkin saja berbeda dengan karier yang telah dicapainya di masa lalu, maka agar kelanjutan itu bisa mengantar ke kehidupan yang lebih sejahtera perlu dukungan yang lebih konkrit.

Dalam mencapai karier kedua dan mengembangkan dukungan tersebut, UU Lansia pantas kita ketengahkan menjelang Hari Lansia pada tanggal 29 Mei 2005 yang akan datang. Lebih-lebih lagi karena jumlah penduduk lansia makin membengkak, dan akan terus membengkak di masa datang.

Ada tiga kelompok yang perlu mendapat dukungan pemberdayaan. *Pertama*, kelompok yang sesungguhnya masih cukup kuat secara fisik untuk memberikan kontribusi dan bekerja membangun bangsa menurut pilihan yang bisa meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Kelompok ini dapat dibantu dengan pemberdayaan yang memungkinkan yang bersangkutan untuk dengan lebih tentram mengembangkan karier pilihannya dengan lebih profesional dan mantab. Kemantaban itu akan menambah percaya diri dan meningkatkan kinerjanya



dalam memberikan sumbangan.

Kedua, kelompok yang tidak lagi mampu untuk mengembangkan diri tetapi masih bisa meneruskan karier lamanya. Kelompok ini barangkali tidak lagi ingin belajar untuk mengembangkan karier yang lain dibandingkan dengan pengalamannya di masa lalu. Mereka puas apabila mendapat kesempatan untuk bekerja lebih lama lagi meneruskan pekerjaan atau cita-cita yang sejak lama telah ditekuninya.

Kelompok *ketiga* adalah mereka yang bisa melanjutkan pekerjaan lamanya, tetapi siap juga untuk mempelajari yang baru. Mereka ini bisa dengan mudah berpindah untuk melanjutkan karier baru untuk masa depan yang masih panjang dan menyenangkan. Kelompok ini bisa siap untuk belajar kembali dan bekerja dalam bidang-bidang yang bisa sangat mengasyikkan dan mungkin saja memberikan kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan kebahagiaan masa lalu yang telah dilewatinya.

Ketiga kelompok masyarakat dan penduduk lansia itu merupakan potensi yang masih sangat tinggi di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Di negara-negara maju potensi semacam ini sudah lama diberi kesempatan untuk maju dengan memberikan kepada mereka pilihan yang cocok dengan aspirasi masa tuanya. Biasanya pilihan itu disesuaikan dengan tempat tinggalnya karena penduduk lansia lebih kurang pas untuk menempuh jarak jauh ke tempat pekerjaannya.

Di negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan misalnya, pekerjaan-pekerjaan sederhana memberikan tiket pada pengendara mobil di jalan tol sudah lama sekali di kerjakan oleh penduduk lansia seperti ini. Penjaga-penjaga lift dan tempat-tempat yang sesungguhnya tidak perlu





penjagaan, kecuali untuk informasi yang luas seperti menjaga benda-benda berharga di museum, sudah lama dipercayakan kepada penduduk lansia.

Penduduk lanjut usia menjaga benda-benda berharga dan kuno tersebut dengan penuh perhatian karena merekapun menikmati nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Untuk memberi kesempatan kepada lansia melakukan banyak kegiatan seperti contoh di negara-negara maju tersebut perlu dikembangkan dua hal pokok sebagai berikut :

Pertama, kepada para lansia sendiri. Mereka diharapkan tidak cepat menyerah dan putus asa sehingga memberi peluang kepada anak atau cucunya untuk menganggap mereka sebagai tidak mampu secara fisik dan siap untuk tinggal di rumah atau diantar ke panti jompo dan semacamnya.

Kedua, masyarakat dan budayanya perlu menyesuaikan diri bahwa sebagian lansia masa depan ini adalah para tenaga potensial yang dengan sentuhan yang tidak terlalu besar dapat dikembangkan menjadi tenaga potensial yang masih tetap sanggup ikut bersama-sama mengisi kemerdekaan, dan karenanya bisa ikut menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan dari kepuasan perjuangannya.

Apabila lansia tidak mendapat kepercayaan untuk tetap memberikan sumbangan kepada pembangunan, idealnya penduduk lansia tinggal bersama keluarga di rumah. Seluruh anggota keluarga memberikan dukungan moril dan materiel menyangkut perawatan yang profesional atau memberikan dukungan kenikmatan sebagai layaknya orang tua yang terhormat. Apabila masih kuat secara fisik bisa saja mempunyai kegiatan penuh, atau menempati perumahan tersendiri. Sebagai selingan, bisa pula dikembangkan beberapa

jenis Lembaga yang dapat memberikan fasilitas khusus, misalnya :

- a. “*Kampus Lansia*”, dimana pelayanan dapat dilakukan oleh Lansia sendiri secara pribadi dengan apabila perlu dapat dibantu oleh anggota dari Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat (LSOM) atau swasta;
- b. Akomodasi type “*Hostel*” dengan pelayanan 24 jam oleh swasta atau LSOM. Lansia dapat melakukan pesanan-pesanan sesuai selera sendiri tanpa merasa “memerintah” atau “menyakiti” anak-anak atau cucu-cucunya;
- b. Pelayanan *Tresna Werdha* oleh LSOM atau swasta, dimana lansia dapat menyerahkan diri untuk beberapa waktu sambil memberi kesempatan kepada keluarga dimana mereka tinggal untuk “*beristirahat*” tanpa lansia dirumahnya dan bisa melakukan kegiatan tanpa rasa rih karena ada lansia dalam rumah tangganya. Sebaliknya lansia dapat memperoleh perawatan ekstra karena Panti ini diasuh secara profesional.

Keberadaan lansia yang makin membengkak dan potensinya yang tinggi merupakan aset yang makin besar. Kalau mereka diperlakukan dengan baik, sebagian bisa menjadi bonus yang sangat menguntungkan. Kearifan dan pengalamannya yang luas bisa mengantar bangsa ini menuju bangsa yang jaya dan sejahtera.

D

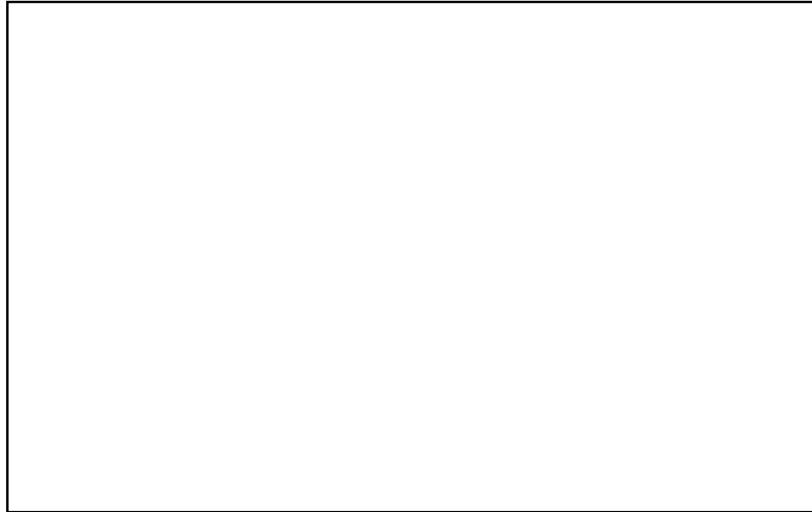


MEMPERSIAPKAN LANSIA SEHAT DAN SEJAHTERA

Hari Lansia Nasional tanggal 29 Mei 2003 lalu diisi dengan berbagai kegiatan. Peringatan kali ini ditandai antara lain dengan menggelar Semiloka oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta. Peristiwa ini sekaligus mengundang perhatian semua pihak bahwa dengan makin majunya kesehatan, KB dan tingkat pendidikan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, jumlah lansia perempuan akan bertambah tinggi.

Kenaikan jumlah lansia perempuan ini merupakan fenomena yang cukup unik karena umumnya kaum perempuan, biarpun tidak mendapat gaji, selalu menjadi insan yang paling sibuk di lingkungan rumah tangga. Kaum perempuan juga merupakan insan yang paling banyak mempunyai resiko meninggal dunia karena urusan reproduksi. Kaum perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan kaum pria tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan reproduksi tersebut. Kaum pria umumnya tidak juga sibuk dalam urusan domestik, urusan dapur dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah itu.

Pada akhir abad 20 yang lalu, penambahan penduduk lanjut usia



sangat tinggi, dari 11,5 juta pada akhir Pelita V, 14,2 juta pada akhir Pelita VI, menjadi sekitar 16,9 juta pada akhir tahun 2000. Pada Pelita V yang bertambah cukup tinggi adalah pada usia 70-74 tahun dengan sekitar 42 persen. Pada akhir tahun 2000 mereka itu menjadi dominan pada usia 75 tahun atau lebih.

Kalau dilihat dalam perspektif jangka panjang, maka terlihat bahwa pada tahun 1980 jumlah penduduk lanjut usia itu baru sekitar 7,7 juta jiwa atau 5,2 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Menurut proyeksi penduduk BPS jumlah itu diperkirakan meningkat menjadi 15,1 – 16,9 juta jiwa pada tahun 2000 atau 7,2 persen dari jumlah penduduk, atau suatu kenaikan sebesar 96 persen selama 20 tahun. Pada waktu yang sama jumlah penduduk seluruh Indonesia meningkat dari 148,0 juta jiwa menjadi 210 juta jiwa atau kenaikan sebesar 42 persen. Dengan demikian jumlah





penduduk usia lanjut di Indonesia meningkat lebih dari dua seperempat kali lipat dibandingkan kenaikan jumlah penduduk dalam waktu yang sama.

Oleh karena itu sejak itu pemerintah menaruh perhatian yang makin sungguh-sungguh. Mulai disusun suatu rancangan undang-undang tentang penduduk usia lanjut. Setelah melalui perdebatan yang cukup simpatik akhirnya naskah rancangan undang-undang itu disepakati oleh DPR RI pada pertengahan tahun 1998. Pada akhir tahun 1998 rancangan itu ditetapkan menjadi Undang-undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Setelah menetapkan UU itu, pada akhir tahun 1998 Indonesia sepakat menetapkan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Penetapan Hari Lanjut Usia Nasional itu sejalan dengan dicanangkannya tahun 1999 sebagai Tahun Internasional untuk Warga Usia Lanjut.

Dengan penetapan itu maka setiap tahun Hari Lanjut Usia Nasional diperingati dengan berbagai acara yang intinya adalah mengingatkan semua pihak untuk memberikan perhatian kepada para usia lanjut, memperhatikan peninggalan mereka dan memperingatkan diri sendiri agar mulai mempersiapkan diri secara dini untuk menyongsong hari lanjut usia yang pasti akan tiba.

Sebagai fenomena umum, seperti diuraikan diatas, jumlah lanjut usia perempuan selalu akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah lanjut usia laki-laki. Penyebabnya telah jelas ialah karena usia harapan hidup kaum perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup kaum laki-laki. Ini berarti bahwa pada umumnya, hampir di semua daerah, jumlah janda akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah duda yang ada.



Padahal partisipasi angkatan kerja pada usia muda kaum perempuan umumnya selalu berada di bawah partisipasi angkatan kerja kaum laki-laki muda. Ini berlanjut bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan pada usia diatas 55 tahun, yaitu usia menjelang masa pensiun, atau usia menjelang masa lansia secara resmi, juga umumnya selalu lebih rendah. Ini juga berarti bahwa kaum perempuan akan mempunyai kekosongan dalam hidupnya pada masa menjanda diatas usia 55 tahun atau lebih, yaitu masa yang umumnya bisa menjadi patokan untuk masih bisa kerja tetapi lebih ringan.

Mereka tidak bisa kerja karena memang sebelumnya tidak bekerja dan mengandalkan segala sesuatu kepada penghasilan dari suaminya yang mempunyai pekerjaan aktif selama masa hidup. Kalau para ibu itu ditinggal suaminya dan menjanda, maka praktis putusya hubungannya dengan pendapatan yang bisa membantu kehidupannya yang sejahtera.

Phenomena ini merupakan keadaan umum di negara berkembang, tidak kecuali di Indonesia. Oleh karena itu dianjurkan agar anak perempuan mendapat dukungan yang kuat untuk bersekolah setinggi-tingginya agar selama masa muda dapat memperoleh kesempatan bekerja dengan pendapatan yang mencukupi dan bisa ditabung untuk menyambung kehidupan barunya setelah memasuki masa lansia, 60 atau 65 tahun keatas. Kalau semasa muda tidak cukup bekerja, bisa saja masa lansianya akan sangat menderita karena belum tentu anak-anaknya sudah bisa mandiri dan memberi sokongan pada waktu orang tuanya memasuki masa lansia.

Itulah salah satu sebabnya, minggu yang lalu Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (Hipprada), dalam kesempatan memperingati Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2003, secara serentak di tiga propinsi, meresmikan Gerakan Sadar Menabung bersama Gubernur dan Para Pejabat



Teras di daerah.

Gerakan Sadar Menabung tersebut adalah suatu usaha untuk mengingatkan kita semua agar selama masih bisa harus berhemat agar di masa yang makin menjadi lemah, kita mempunyai simpanan yang cukup untuk melanjutkan kehidupan yang dimasa yang akan datang akan bertambah panjang.

Tabungan yang diharapkan terkumpul dapat dipergunakan untuk memupuk modal yang berguna untuk membuka usaha bersama agar kehidupan kita bertambah sejahtera. Tabungan itu sekaligus menjadi bekal untuk melanjutkan sekolah atau untuk mengikuti kursus-kursus yang berguna di hari tua.

D D D

